

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
DI KELURAHAN BAJIMAPPAKASUNGGU KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR**

**MOHD ZULKIFLIE  
E 211 06 901**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pada jurusan ilmu administrasi Negara  
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas hasanuddin

**PROGRAM REGULER SORE  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2009**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judu Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN BAJIMAPPAKASUNGGI' KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR**

Nama Penulis : **MOHD ZULKIFLIE**

Nomor pokok : **E211 06 901**

Program Study : **ADMINISTRASI NEGARA**

Telah disepakati dan disetujui oleh pembimbing

Makassar, Februari 2009

### **Mengetahui :**

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Sangkala, MA.**

Nip. 131 961 981

### **Menyetujui :**

Pembimbing



**Drs. H.M. Akib Halede, MS**

Nip. 130 535 947

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN BAJIMAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR**

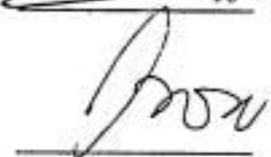
Nama Penulis : **MOHD ZULKIFLIE**

Nomor pokok : **E211 06 901**

Program Study : **ADMINISTRASI NEGARA**

Telah Diuji Dan Diperiksa oleh Tim Penguji Komprehenship/Laporan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Hari : Rabu, Tanggal : 4, Bulan Maret, tahun 2009

Disetujui Tim Penguji

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	: Drs. H.M. Akib Halede, MS	
Sekretaris	: Adnan Nasution, S.sos, M.Si.	
Anggota	: Prof. Dr. H.Sulaiman Asang, MS	
	Dr. Alwi, M.Si	
	Drs. Nelman Edy, M.Si	

## ABSTRAK

MOHD ZULKIFLIE. 2009. Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam mengimbangi pengeluaran masyarakat di kelurahan Bajimappakasunggu dan juga dampak BLT terhadap peningkatan status ekonomie masyarakat di kelurahan Bajimappakasunggu.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif induktif berupa kata – kata yang menggambarkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Di kelurahan Bajimappakasunggu. Evaluasi Kebijakan BLT akan dianalisis secara deskriptif induktif dengan mengambil data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam Bantuan Langsung Tunai (triangulasi) dan data sekunder berasal dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp.100,000 per/Bulan tetapi dibagikan 3 (Tiga) bulan sekali dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat dan hanya dapat bertahan beberapa minggu saja sampai 1 (Bulan) apabila dilihat dari tujuan BLT yang sifatnya sementara memang berhasil. Sementara penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana BLT tersebut tidak mampu untuk mengubah status ekonomie masyarakat di kelurahan bajimappakasunggu.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ *EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DIKELURAHAN BAJIMAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMANJANG KOTA MAKASSAR* “. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dengan keterbasan pengalaman, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu demi kesempurnaannya sangat diharapkan saran, kritik dan koreksi dari pembaca.

Dalam penulisa skripsi ini mulai saat pengumpulan data sampai pada penyelesaian telah mendapat dukungan dan bantuan dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A.Paturusi, Sp.B.,Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Sangkala, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

3. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, Msi selaku Penasehat akademik, terimakasih atas dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Drs.H.M. Akib Halede. MS, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta bimbingan dan petunjuknya kepada penulis sejak persiapan skripsi ini hingga selesai.
5. Para tim penguji, Prof. Dr. H.Sulaiman Asang, MS, Dr. Alwi, M.Si, Drs. Nelman Edy, M.Si dan Adnan Nasution, S.sos, M.Si.
6. Dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah mendidik/mengajar selama ini.
7. Lurah Bajimappakasunggu (Drs.H.Akbar Yusuf ), serta staf kantor kelurahan bajimappakasunggu atas izin yang diberikan untuk mengadakan penelitian, serta bantuan dan kerjasamanya selama ini. Setra Pencatat Lapangan (PCL) Kelurahan Bajimappakasunggu ibu Heny yang telah memberikan waktu untuk membantu melakukan penelitian ini
8. Teristimewa Kepada kedua orang tua tercinta H.ABD.Gaffar Syam dan Hj.Halifah Wahab.(Alm) yang telah banyak memberikan dorongan moril dan material selama menyelesaikan study sampai dengan selesainya skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku Mohc Haiedir. SE , Moh Romi Azizi, Sholilah Iyanatullah, Nurul Hidayati, Dian Islamiati, dan cappo-cappokku. Muh.

Sadsali Abdullah SE, SeloNa, Dani Ismail, Ikbale. Yang telah banyak membantu, memberikan dorongan dan bimbingan selama ini.

10. Serta sahabat-sahabatku SMAN 02 Watampone Harniati dan Eman, serta Adam dan Susi, yang telah membantu, meneliti dan menyusun Skripsiku. Tak lupa dengan sahabat seperjuangan dikota Daeng saudara Mas Bowo
11. Serta teman-temanku seperjuangan Opic, Fadly, dan Pak juned dalam menuntut ilmu di Jurusan Administrasi reguler sore Universitas Hasanuddin Makassar.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga jasa-jasanya dan segala bantuan, bimbingan dan dorongannya yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.....Amin. dan serta karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Februari 2009

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Batasan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan .....	8
1. Evaluasi.....	8
2. Kebijakan .....	10
3. Evaluasi Kebijakan .....	13
B. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
C. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	20
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	21
E. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	24
F. Mekanisme dan Tahapan BLT.....	26

G. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Tipe Penelitian.....	31
D Sumber Data.....	32
E. Teknik Pemilihan Informan Kunci .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Defenisi Operasional.....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Bajimappakasunggu .....	38
1. Letak Wilayah.....	38
2. Penduduk.....	38
a. Tingkat Pendidikan Penduduk .....	38
b. Mata Pencarian Penduduk.....	40
c. Agama dan Kepercayaan Penduduk.....	41
B. Gambaran Umum kantor Kelurahan Bajimappakasunggu.....	42
C. Profil Pegawai Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu.....	50
<b>BAB V HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Kebijakan BLT di Kelurahan Bajimappakasunggu.....	53
1. Landasan Kebijakan Pelaksanaan BLT .....	53

2. Mekanisme Pelaksanaan BLT di Kelurahan Bajimappakasunggu .....	57
B. Dampak Kebijakan BLT dalam mengimbangi pengeluaran Masyarakat .....	61
C. Dampak Kebijakan BLT dalam peningkatan status Ekonomie Masyarakat ....	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Identitas Informan dan Responden .....	76
Lampiran 2: Dokumentasi .....	78
Lampiran 3: Struktur Organisasi Kelurahan Bajimappakasunggu.....	79
Lampiran 4: Empat Belas (14) Kriteria Rumah Tangga Sasaran Makassar.....	80

## DAFTAR TABEL

Bagan 2.1 : Bagan Kerangka Konseptual .....	29
Tabel 4.1 : Tingkat pendidikan di Kelurahan Bajimappakasunggu .....	39
Tabel 4.2 : Sarana Pendidikan di Kelurahan Bajimappakasunggu.....	40
Tabel 4.3 : Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Bajimappakasunggu .....	40
Tabel 4.4 : Data Pemeluk Agama di Kelurahan Bajimappakasunggu .....	41
Tabel 4.5 : Jumlah Pegawai di lingkup kantor kelurahan Bajimappakasunggu .....	51
Tabel 4.6 : Jumlah Pegawai di lingkup kantor kelurahan Bajimappakasunggu Menurut Golongan .....	51
Tabel 4.7: Jumlah Pegawai di lingkup kantor kelurahan Bajimappakasunggu menurut tingkat Pendidikan.....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri pada bulan Mei tahun 2008 dari harga Rp 4500 rupiah menjadi Rp 6000 rupiah perliter mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun, karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Akibat kenaikan BBM tersebut masyarakat miskin akan terkena dampak sosial yang menyebabkan taraf kesejahteraannya semakin menurun atau menjadi semakin miskin.

Didasari bahwa upaya menuntaskan kemiskinan tidak mudah serta membutuhkan strategi yang terpadu karna persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Maka dari itu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berupa program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*), seiring dengan besarnya beban subsidi BBM semakin berat dan resiko terjadinya defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan baru pengalihan subsidi BBM selain Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS), juga diperuntukan bagi pembebasan biaya pendidikan pada tingkat tertentu, biaya pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi gula dan pembangunan prasarana pedesaan. Kebijakan pengalihan subsidi BBM ini juga disinergikan dengan kebijakan

pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) meliputi :

a. PKPS BBM Tahap I :

- Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).
- Bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya
- Bidang infrastruktur pedesaan, diarahkan pada penyediaan infrastruktur di desa-desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, tambatan perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul-betul memerlukan).

b. PKPS BBM Tahap II :

- Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (*unconditional cash transfer*) sebesar Rp.100.000,- per bulan selama satu tahun, dan setiap tahap diberikan Rp.300.000.- / 3 bln. Sasarannya Rumah

Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan

- Pada Tahun 2008 Pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni s.d Desember 2008 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran sebesar Rp.100.000,- per bulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000.- / 3 bln (Juni-Agustus) dan Rp.400.000.- / 4 bln (September-Desember).

Sasarannya Rumah Tangga Sasaran dengan menggunakan data base RTS-BLT tahun 2005/2006 yang telah diverifikasi pada tahun 2007, sesuai hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

Ada yang berpendapat bahwa Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat *charity (pemberian)* dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan Pemerintah serta secara ekonomi mikro menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh Pemerintah (*unconditional cash transfer*), (Juklis RI, 2008:4).

Pendapat tersebut patut menjadi perhatian semua pihak, karena menghadapi masyarakat miskin selangkahnya tidak dengan program yang sifatnya *hit and run*, harus dengan program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimilikinya

(*empowering*). Namun pada sisi lain Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan sosial (*social protection*) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian harga BBM atau dalam keadaan adanya kebijakan/ program penyesuaian secara struktural akan mempengaruhi masyarakat luas (*Structural Adjustment Program/ SAPs*). Karena itu program BLT-RTS dalam rangka PKPS BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) melalui asistensi sosial (*social assistance*). Apalagi semua paham bahwa mekanisme subsidi BBM sebelumnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang mampu.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, sasaran dan tujuan program BLT yang diinginkan maka presiden mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan BLT untuk RTS. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan bagi aparatur pemerintah baik pusat dan daerah sehingga dapat bekerja secara profesional dan manajemen pelayanan umum (*public service*) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dan yang perlu dikedepankan oleh pemerintah adalah bagaimana saling koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Rian Nugroho (183:2003) kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konsumennya. Sejahtera mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara

"harapan" dengan "kenyataan". Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai program-program penghapusan subsidi BBM, masyarakat miskin di Kelurahan Bajimappakasunggu juga mendapat Bantuan Langsung Tunai tersebut dari pemerintah berdasarkan kriteria-kriteria penerima bantuan program kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah baik program jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun masyarakat tersebut telah mendapatkan dana BLT tetapi dilapangan terlihat kehidupan masyarakat di kelurahan tersebut seperti kehidupan biasa-biasa saja tidak ada perubahan-perubahan yang menonjol seperti perubahan ekonomi dan penghasilan setelah adanya bantuan tersebut. Keberhasilan sebuah program kebijakan tentunya tidak dapat dilihat dan di ukur tanpa adanya evaluasi terhadap program tersebut. Hal ini penting sebagai acuan untuk pelaksanaan serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan program selanjutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka Peneliti mencoba mengangkat judul sebagai berikut.

***Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang diuraikan diatas maka penulis ingin membatasi lingkup permasalahan dengan merumuskan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah dana BLT dapat mengimbangi pengeluaran masyarakat miskin di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar akibat kenaikan harga BBM?
2. Apakah kebijakan BLT dapat memberi dampak peningkatan status ekonomi masyarakat di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah dana BLT dapat mengimbangi pengeluaran masyarakat miskin di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar akibat kenaikan harga BBM
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan BLT dapat memberi dampak terhadap perubahan status ekonomi masyarakat di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang

studi kebijakan publik dengan pokok kajian tentang implementasi kebijakan

- 2) Menambah pemahaman peneliti dan sebagai bahan pustaka ilmu administrasi negara khususnya tentang hasil-hasil penelitian implementasi kebijakan publik

**b Manfaat Praktis**

- 1) Menambah wawasan peneliti dalam bidang ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 2) Dapat menjadi bahan informasi bagi aparat pemerintah dan dinas yang terkait di Kota Makassar
- 3) Dapat menjadi bahan penelitian bagi peneliti lain seputar Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai
- 4) Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial, khususnya masalah-masalah kemiskinan.
- 5) Dari hasil temuan penelitian ini diharapkan, dapat terumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, baik bagi para pembuat kebijakan atau oleh para peneliti.

**D. Batasan Penelitian**

Pembahasan masalah dibatasi pada pelaksanaan program kebijakan Bantuan Langsung Tunai di wilayah kelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada tahun 2008.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan

##### 1 . Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995) "Evaluasi" mempunyai arti penilaian. Penilaian berarti nilai atau penentuan manfaat dari pada suatu kegiatan. Maka evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil dari suatu kegiatan atau yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Mustopadidjaja A.R. (2003:45) mendefenisikan evaluasi sebagai berikut:

"Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena; di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu."

Menurut W. N. Dunn (1998:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Sementara itu Siagian (1990:141) mendefenisikan evaluasi sebagai berikut:

"Bahwa untuk mengetahui keberhasilan suatu program maka kegiatan yang menyangkut proses pengukuran dan perbandingan dari

pada hasil-hasil pekerjaan yang nyata yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.”

Sedangkan untuk proses evaluasi dikemukakan oleh Suchman dalam Michael Quinn Patton(1978:166) sebagai berikut:

*“The analysis of process evaluation may be made according to four main dimension dealing with: (1) The attributes of the program itself; (2) The population exposed to the program; (3) The situation context within which the program takes place; and (4) The different kinds of effects produced by the program.”*(artinya: analisis proses evaluasi dapat dibuat berdasarkan empat dimensi yang berhubungan dengan ; (1) sifat-sifat dari program itu sendiri; (2) populasi yang ditunjukkan dalam program;(3)konteks kejadian dimana program tersebut diselenggarakan ;dan (4) jenis-jenis dampak yang berbeda yang dihasilkan oleh program

Proses ini ternyata bukanlah sekedar analisis melainkan sebuah studi evaluasi yang dapat membatasi pengumpulan dan analisis datanya untuk menentukan apakah sebuah program tersebut berhasil atau tidak dengan melihat dampak dari program yang akan diselenggarakan.

Selanjutnya Sugiyono (1998:5) memberikan dua jenis evaluasi dalam penelitian tentang evaluasi yaitu penelitian evaluasi formatif yang menekankan pada proses dan evaluasi sumatif yang menekankan pada produk atau hasil. Evaluasi formatif ingin mendapatkan feedback dari suatu aktifitas dalam suatu proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan program yang berupa produk/hasil tertentu.

Keberhasilan dari suatu program kebijakan tidak saja dapat diukur melalui hasil atau dampak dari kebijaksanaan program tersebut, tetapi juga harus didahului dengan

evaluasi dari proses implementasi kebijaksanaan tersebut. Hal ini berkaitan yang dikemukakan Langbein dalam Sugiyono (1998:6) bahwa:

*“Proses evaluation should often prede or accompany outcome evaluation, because process can actually effect outcomes”*(Artinya: “Evaluasi proses seharusnya didahulukan atau didampingi evaluasi hasil, karena proses sebenarnya dapat memperbanyak hasil)

## 2. Kebijakan

Menurut Carl J.Fredrick yang dikutip oleh M. Irfan Islamy (17;2004) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut James E. Anderson dikutip oleh M.Irfan Islamy (17;2004 ) bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah.

Amara Raksataya dikutip oleh M.Irfan Islamy (18;2004) mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil pemikiran-pemikiran/usulan-usulan dari individu, kelompok dan pemerintah untuk menggunakan segala kemampuan yang dimiliki untuk diterapkan guna mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.

Menurut R. Day yang dikutip M.Irfan Islamy (18;2004) Kebijakan negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Menurut Edwar dan Sharkansky dikutip oleh M. Irfan Ismail (18;2004). Kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan menurut David Easton kebijakan negara adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan defenisi ini Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Ini merupakan karna pemerintah memiliki *Authorities In A Political System*, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat didalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawabnya atau peranya.

Kejelasan dalam defenisi kebijakan, lebih jauh dapat kita cermati dari pandangan para ahli.

“Kebijaksanaan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai “*a projected program of goals, values and practicies*” (“suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”). Carl J. Friedric mendefenisikan kebijakan sebagai berikut”...*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in a effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (“...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”). (M. Irfan Islami, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,2001:15).

Ketika dikaitkan dengan pemerintahan, menurut Taliziduhu Ndraha (2003:498)

“kebijakan pemerintahan dapat didefenisikan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan”

Pemerintah dalam menerapkan sebuah kebijakan, mesti pula memperhatikan secara khusus aspek motivasi yang menjadi landasan untuk membuat masyarakat menjalankannya. Motifasi ini juga yang oleh Strauss, sebagaimana dijelaskan Inu Kencana Syafiie (2001:109), “Bahwa bagaimana pemerintah (penguasa) memotivasi orang agar lebih giat melaksanakan kebijakan yang dimaksudkan oleh agar tujuan yang diinginkannya tercapai”.

Merujuk dari pandangan para ahli tersebut tentang pengertian kebijakan atau biasa disebut sebuah kebijaksanaan. Dapat ditarik sebuah benang merah, bahwa kebijakan lahir dari pembacaan kondisi sosial yang ada dan oleh pengambil kebijakan dirumuskan sebuah upaya penyelesaian untuk pencapain tujuan bersama.

Untuk lebih jauh memahami kebijakan, dalam prakteknya digunakan metode analisis kebijakan. Analisis ini mengkaji kebijakan dan instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah, khususnya aspek yang menjadi fokus implementasinya. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses adalah melakukan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, beberapa ahli memberikan pendapatnya sebagai berikut :

James E. Anderson mengatakan (1997:272) :

*“Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri”.*([www.clgi.or.id](http://www.clgi.or.id) 11-01-2009)

Dari beberapa pengertian kebijakan negara di atas, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, maka dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

### **3. Evaluasi Kebijakan**

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satunya mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Ryan Nugroho, 2004:183)

Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact / outcome dan policy output. “Policy Impact / outcome ” adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan “Policy output” ialah dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah. Menurut Irfan Islamy, (2004 : 114-115).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan evaluasi kebijakan adalah segala kegiatan-kegiatan pelaksanaan sampai pada akhir kegiatan program/kebijakan perlu diawasi/ monitoring agar tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan harapan kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu langkah terakhir dari proses kebijakan yang mencakup isi pelaksanaan dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi

memainkan sejumlah fungsi utama dalam menganalisis kebijakan, hal ini diungkapkan oleh Dunn(1998:608) yang dapat terbagi sebagai berikut:

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai dengan tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu.
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan sumbangan. Terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungannya dengan masalah yang dituju.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Menurut SamodraWibawa dkk (2003;186) yang dikutip oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto. Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Esplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya, dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.



- b. Kepatutan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kelompok-kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Ketika kebijakan publik telah dilaksanakan, diperlukan adanya evaluasi dalam menilai kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dari suatu kebijakan dan dilakukan karena tidak semua kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan (Winarno, 2001: 2). Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 2000). Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan.

Menurut Badjuri, Abdulkahar & Yuwono (2003: 132), evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan

keefisienannya. Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah :

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.
- d. Dari tujuan evaluasi kebijakan tersebut banyak pengamat menyarankan untuk melakukan evaluasi secara profesional, karena evaluasi kebijakan dapat membantu dalam:
- e. Menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan untuk dipertahankan dalam konteks perubahan dewasa ini?
- f. Memberikan pemikiran ada cara lain yang efektif, efisien dalam implementasi kebijakan.
- g. Menguji apakah dampak kebijakan yang diinginkan sudah mencapai sebagaimana yang tertulis?
- h. Menilai apakah program tersebut perlu diperluas, dipersempit, diperpanjang atau mungkin dihentikan sama sekali.
- i. Memutuskan apakah pada masa yang akan datang sumber daya pendukung kebijakan tersebut perlu ditambah, dikurangi atau bahkan dihentikan secara total; serta

- j. Membantu meningkatkan kredibilitas pemerintah khususnya berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan publik pada umumnya.

Kelahiran sebuah kebijakan tanpa di telah lebih jauh akan memberikan implikasi yang buruk, karena tanpa evaluasi atas program yang ada tidak akan ditemukan gambaran sejauh mana efektifitas kebijakan tersebut dan relevansinya terhadap tujuan awal yang dirumuskan. Selain itu pula, tanpa kajian yang sistematis sebuah kebijakan hanya akan menjadi program begitu saja tanpa adanya capaian yang jelas. Tujuan dari pada adanya evaluasi terhadap kebijakan yang ada adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan dari adanya kebijakan dapat dicapai.
- b. Untuk mengetahui dampak positif atau negative dari pelaksanaan kebijakan.
- c. Untuk mengetahui efektifitas dari dampak kebijakan.

## **B. Pengertian Implementasi kebijakan**

Implementasi mencakup kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh bermacam ragam aktor dengan menggunakan berbagai macam peralatan, sehingga sasaran yang dikehendaki dapat tercapai.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip oleh solichin (1990:54) implementasi negara adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun pula dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan ini mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Biasanya proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampaknya keputusan sebagai persepsi oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang /peraturan yang bersangkutan.

Menurut Salusu, (1996:277) Implementasi adalah suatu proses yang terarah dan tekordinasi, melibatkan banyak sumber daya, oleh sebab itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa implemtasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horm dikutip oleh solichin (1990:51) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyakut

jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan

### **C. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga yang tergolong miskin agar kesejahteraannya tidak menurun jika harga BBM dinaikkan, dan program pemerintah ini adalah termasuk program jangka pendek.

Dalam buku Pendataan Program Perlindungan Pendataan Sosial oleh BPS tertulis bahwa Program BLT, adalah program pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu kepada RTS yang mencakup rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (2008:1).

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah Indonesia terbagi atas tiga klaster yaitu klaster:

1. Program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga miskin,
2. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dengan sasaran pemberdayaan kelompok masyarakat
3. Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil berupa program bantuan permodalan dan bentuk kredit usahan rakyat (KUR).

Program BLT termasuk dalam klaster 1 (Satu) bersama program bantuan beras Untuk orang miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat(Jamkesma) atau biasa disebut Askeskin untuk gratis untuk perawatan kesehatan gratis, program beasiswa untuk mahasiswa miskin serta program bantuan untuk kelompok rentan sosial lainnya.

Program BLT tahun 2008, pada dasarnya merupakan program jaringan pengamanan sosial, yang sifatnya hanya sementara dan bertujuan:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

#### **D. Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Dasar hukum Bantuan Langsung Tunai adalah Keputusan dalam UU APBN-P, Pasal 14 ayat (2) berbunyi Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008.

BLT Dilaksanakan berdasarkan INPRES No3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk RTS. Tugas Kementerian /Lembaga dalam pelaksanaan BLT berisikan :

- a. Presiden menugaskan Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian langsung tunai kepada rumah tangga sasaran, dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
- b. Presiden menginstruksikan kepada Menko Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait para gubernur, dan kepala BPS.
- c. Presiden menginstruksikan kepada Menko Kesra, segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dan penanganan pengaduan.
- d. Presiden menginstruksikan kepada Menkeu segera menyediakan pendanaan segera setelah menerima usulan dari Mensos, serta menyusun dan mengendalikan anggaran untuk pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
- e. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk melakukan koordinasi pelaksanaan dalam

penyusunan rencana pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, menyusun organisasi pelaksanaan program pemberian langsung BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, serta melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

- f. Presiden menginstruksikan kepada Mensos untuk menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan pemberian BLT kepada RTS, mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada menkeu sesuai data rumah tangga untuk program pemberian BLT kepada RTS yang disediakan oleh BPS, serta diinstruksikan kepada Mensos untuk segera menyalurkan BLT kepada RTS sesuai program yang telah disusun oleh Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
- g. Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
- h. Presiden menginstruksikan Panglima TNI segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan dalam pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Kepada Kapolri diinstruksikan segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga ketertiban dan

keamanan masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM

- i. Presiden menginstruksikan BPS untuk melakukan kegiatan penyediaan data RTS untuk program pemberian BLT kepada RTS bersama pemerintah kabupaten/kota. Kepada BPKP diinstruksikan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
- j. Presiden menginstruksikan para Gubernur, beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing. Kepada para bupati, walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

#### **E. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Adapun kriteria (Rumah Tangga Sasaran) RTS layak mendapatkan BLT menurut Badan Pusat Statistik diantaranya :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester

- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Khusus kelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang, apabila masyarakat sudah memenuhi 9 (Sembilan) kriteria penerima Bantuan Langsung

Tunai (BLT) di atas maka warga atau masyarakat tersebut sudah dapat menerima Bantuan Langsung Tunai.

#### **F. Mekanisme dan Tahapan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT-RTS (Departemen Sosial RI, 2008:11) sebagai berikut.

1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.
3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
4. Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
5. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia

7. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/ Kelurahan.
8. Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar.
9. Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
10. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan. Terhadap KKB Penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat.
11. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia.
12. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-RTS oleh tim terpadu.
14. .Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.

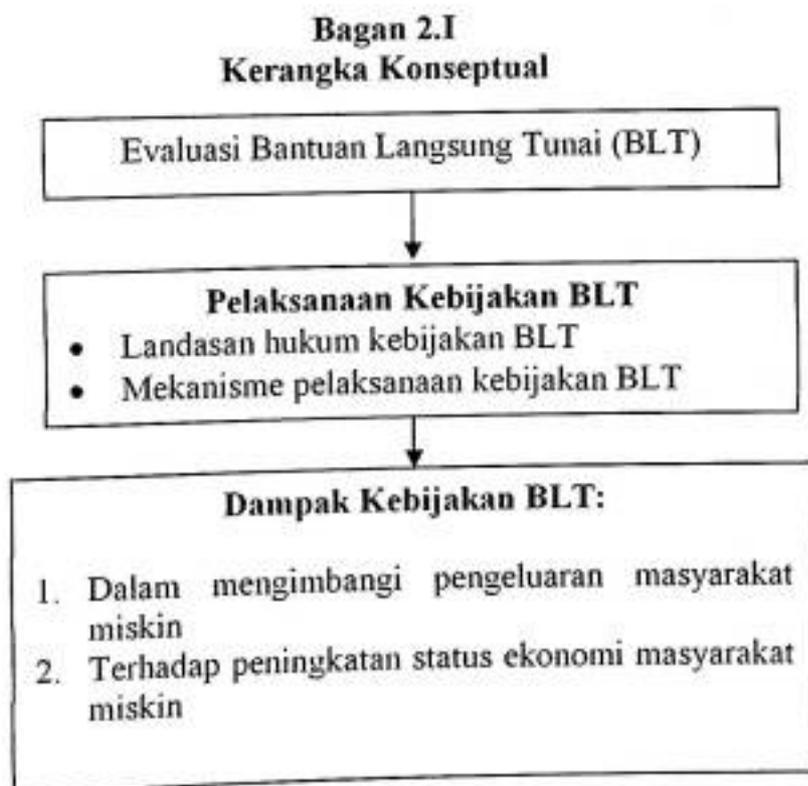
Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-RTS, akan dilaksanakan pemutakhiran data (updating) terhadap data Rumah Tangga Sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009, Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai bagi RTS adalah Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran BLT-RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga masing-masing lembaga bertanggungjawab terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang

maksimal, maka masing-masing lembaga saling berkoordinasi. Dalam pelaksanaan Program BLT-RTS difasilitasi penyediaan Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan

## F. Kerangka Konseptual

Untuk *Mengevaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar*, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan BLT terhadap status ekonomi masyarakat, serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat miskin dalam mengimbangi pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sehubungan dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Dikelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Beralamat di jalan Baji Ati I No.2 Kota Makassar berdasarkan pertimbangan, karena pada daerah itu telah berlangsung program BLT 2008

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif historis Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami dampak dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan pada tiga sumber informasi pengelola kegiatan, pemangku kepentingan dan penduduk miskin itu sendiri, yang dikenal sebagai triangulation. Menurut Patton (1991: 98), alasan digunakannya tipe triangulasi ini adalah, karena ada kelemahan pada strategi pengumpulan data secara tunggal. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini didasarkan pada pendapat Denzin (1978) dalam (Patton, 2006: 99), bahwa logika triangulasi berdasarkan pada perkiraan:

”Tidak ada metode tunggal yang secara mencakupi memecahkan masalah faktor penyebab tandingan.. karena setiap metode menyatakan aspek yang berbeda atas realitas empiris, metode

ganda atas pengamatan haruslah dipakai. Hal inilah yang disebut dengan triangulasi”.

Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, menurut (Bogelan dan Taylor, 1975: 5) dalam (Moleong, 2007: 4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan itu Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2007: 4) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Sebagaimana halnya dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2007: 6), tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

### **C. Tipe Penelitian**

Karena pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka dalam penelitian ini akan menggambarkan secara lebih rinci pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dikelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, baik itu proses pelaksanaannya, pemahaman dan tanggapan masyarakat, serta dampak dari

1999: 63-64) tentang jenis penelitian yang merupakan upaya pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif induktif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Demikian pula yang dinyatakan Moleong ( 2007 : 297 ), maksud umum dari pendekatan deskriptif induktif memungkinkan temuan – temuan penelitian muncul dari ‘keadaan umum’, tema – tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal – hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.

#### **D. Sumber Data**

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan keterangan dalam penelitian ini.
- Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan literatur yang mendukung penelitian.

#### **E. Teknik Pemilihan Informan kunci.**

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Informan yang ditentukan dalam penelitian dibagi dalam tiga kelompok (triangulation), <sup>↳ keapsethan data -</sup> yaitu: unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat dan unsur kelompok masyarakat penerima Raskin itu sendiri.

Menurut Patton (2006: 279) teknik pengambilan informan kunci berdasarkan pada; 1) melakukan cara pengumpulan data yang berbeda dan strategi penelitian yang berbeda pada pertanyaan yang sama, 2) menggunakan pekerja penelitian dan pewawancara yang berbeda untuk menghindari bias pada satu orang yang bekerja sendiri, 3) menggunakan beberapa metode yang mengkaji program; dan 4) menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan sekumpulan data.

Salah satu jenis teknik ini adalah purposive sample. Menurut Neuman (2000: 198) sample purposive ini merupakan jenis penarikan sample untuk tujuan khusus, yaitu situasi yang; 1) untuk memilih kasus-kasus yang informasinya bersifat khusus, 2) untuk memilih anggota-anggota yang sulit dicapai, dan 3) untuk mengidentifikasi kasus-kasus khusus untuk investigasi yang lebih mendalam.

Maka dalam penelitian ini, informan kunci yang diwawancarai secara keseluruhan berjumlah 10 orang. Dari pihak pemerintah adalah, Kepala Kelurahan Bajimappakasunggu berjumlah 1 orang. Sedangkan untuk informan kunci yang berasal dari tokoh masyarakat berjumlah 1 orang yaitu Pencatat Lapangan Kelurahan Bajimappakasunggu. Dan dari unsur kelompok masyarakat adalah pihak warga penerima Bantuan Langsung Tunia berjumlah 8 orang

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan (Lofland and Lofland 1984: 47) dalam (Moleong, 2000: 112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati (Hadi, 2004: 167). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi peneliti dengan subyek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang obyek yang akan diteliti.
- 2) Wawancara adalah dengan membagi informan dalam tiga kelompok (triangulation), yaitu, Pertama, unsur pemerintah, Unsur Tokoh Masyarakat, dan unsur masyarakat miskin penerima beras Raskin.
- 3) Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari dan Nawawi, 1995: 133). Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar maupun laporan kegiatan pelaksanaan BLT dan buku-buku serta majalah. Beberapa data sekunder yang dicari dalam penelitian ini adalah Laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dikelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan lain sebagainya yang dianggap relevan.

## **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2007: 247), proses analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satu-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari analisa data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Dalam penelitian ini data-data tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dikelurahan Bajimappakasunggu Kecamatan Mamajang kota Makassar yang telah didapatkan, baik melalui wawancara atau dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan kepada kelompok informasi yang telah disusun. Apabila didapatkan data yang kurang maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari kembali baik melalui wawancara atau dokumen yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisa terhadap data yang ada.

## **H. Defenisi Operasional**

Untuk lebih terarah dalam melakukan penelitian ini maka disusun definisi operasional sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai adalah proses akhir dari pelaksanaan kebijakan BLT yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan, manfaat serta dampak (hasil) yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut berjalan.
2. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai adalah tahapan-tahapan atau mekanisme yang terencana dan terstruktur yang ditempuh oleh beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan BLT.
  - a. Landasan hukum Bantuan Langsung Tunai adalah dasar yang dijadikan kekuatan hukum untuk melaksanakan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
  - b. Mekanisme pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai adalah cara-cara/ aturan-aturan yang terarah agar kebijakan tersebut berjalan sesuai prosedur-prosedur yang ditetapkan guna pencapaian tujuan dari kebijakan BLT itu sendiri.
3. Dampak Kebijakan Bantuan Langsung Tunai adalah akibat ditimbulkan dari kebijakan bantuan langsung tunai tersebut yang dilakukan/ diterapkan kepada masyarakat tersebut.
  - a. Mengimbangi pengeluaran masyarakat, adalah pengaruh Bantuan Langsung Tunai terhadap perimbangan pengeluaran mendesak rumah tangga sasaran.

- b. Peningkatan status ekonomie masyarakat adalah perubahan status ekonomi yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilakukan/diterapkan didalam kehidupan masyarakat.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Baji Mappakasunggu**

##### **1. Letak Wilayah**

Bajimappakasunggu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mamajang yang terletak di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah dari kelurahan ini yaitu 15,00 Km<sup>2</sup> dengan distribusi Luas pemukiman 11,6 Km<sup>2</sup>, Luas daerah perkantoran sekitar 0,08 Km<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum sebesar 3,26 Km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Bajimappakasunggu, yaitu:

- Sebelah Utara : Kelurahan Pabatang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Anyar
- Sebelah Timur : Kelurahan Bongaya
- Sebelah Barat : Kelurahan Tamparang Keke

##### **2. Penduduk**

Kelurahan Bajimappakasunggu terdiri atas 4 RW dan 27 RT, dengan jumlah penduduk 4.518 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 2116 jiwa dan perempuan sebanyak 2402 jiwa.

###### **a. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Dipandang dari segi pendidikan, penduduk di kelurahan Baji mappakasunggu sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Hal ini dapat kita lihat dari data monografi kelurahan Bajimappakasunggu, dimana jumlah penduduk yang telah

mengenyam bangku sekolah maupun kuliah lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak pernah sekolah.

Untuk jelasnya data tingkat pendidikan kelurahan Bajimappakasunggu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 .Tingkat pendidikan di kelurahan Bajimappakasunggu**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	412
2	Tidak pernah sekolah	20
3	Pernah SD/ sederajat tapi tidak tamat	80
4	Tamat SD/ sederajat	279
5	Tamat SLTP/ sederajat	432
6	Tamat SLTA/ sederajat	1396
7	D-3	15
8	S-1	367
9	S-2	4

*Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan Bajimappakasunggu*

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di kelurahan Bajimappakasunggu telah mengenyam pendidikan, terbukti bahwa tingkat tamatan mulai dari SD sampai dengan S-2 berjumlah 2493, sementara yang sama sekali belum pernah sekolah hanya berjumlah 20 orang, dari proporsinya dapat kita katakan bahwa setiap seratus penduduk yang telah mengenyam pendidikan terdapat satu orang penduduk yang sama sekali belum pernah bersekolah.

Tingkat pendidikan penduduk yang sudah memadai ini tentunya didukung oleh tingkat kesadaran penduduk terhadap pendidikan yang begitu tinggi, selain itu

sarana dan prasarana pendidikan yang berada di kelurahan Bajimappakasunggu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah setempat terhadap pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di kelurahan Baji Mappakasunggu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Sarana pendidikan dikelurahan Bajimappasunggu**

Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit	Jumlah Murid	Jumlah Pengajar
SD/ Sederajat	1	175	15
SLTP/Sederajat	2	2823	136
SLTA/Sederajat	2	2647	148
Perguruan Tinggi	1	245	18

*Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan Bajimappakasunggu*

#### **B. Mata Pencaharian Penduduk**

Dilihat dari mata pencaharian penduduk, sebagian besar penduduk Kelurahan Bajimappakasunggu bermata pencaharian sebagai pengusaha. Pada urutan kedua, sebanyak 157 orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tukang. Selanjutnya disusul dengan penduduk yang bermata pencaharian sebagai tukang batu, yaitu berjumlah 98 orang. Untuk lebih lengkapnya berikut ini disajikan tabel distribusi penduduk Bajimappakasunggu berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk kelurahan Bajimappakasunggu.**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pedagang/Wiraswasta/Pengusaha	470
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	157
3.	Tukang Batu	98

4.	Supir	12
5.	TNI dan POLRI	43
6.	Penjahit	9
7.	Montir	7

*Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan Bajimappakasunggu*

### C. Agama dan Kepercayaan Penduduk

Dari sisi keagamaan, Kelurahan Bajimappakasunggu merupakan wilayah dengan nuansa keagamaan yang kuat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid dan musholla. Penyebaran penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4. Data Pemeluk Agama Kelurahan Bajimappakasunggu**

No.	Agama	Pemeluk (orang)
1.	Islam	4045
2.	Kristen	326
3.	Khatolik	38
4.	Hindu	91
5.	Budha	18

*Sumber: Daftar Isian Potensi Kelurahan Bajimappakasunggu*

Jika kita melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk dikelurahan Bajimappakasunggu beragama islam, ini kita lihat dari jumlah pemeluknya yang tertinggi yaitu: agama Islam sebanyak 3045 kemudian diurutan kedua, penduduk beragama Kristen sebanyak 291 orang selanjutnya agama hindu 61

orang disusul dengan agama khatolik dan agama Budha masing-masing 20 dan 18 orang pemeluknya. Beragam agama dan kepercayaan yang terdapat dikelurahan ini ternyata tidak membuat sebuah diskriminasi terhadap penganut agama minoritas.

## **B. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu**

Kantor Lurah Bajimappakasunggu terletak di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Beralamat di jalan Baji Ati I No.2 Kota Makkassar.

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekertaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu.

1. Kepala Kelurahan

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya. Adapun uraian fungsi lurah antara lain:

- a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pedoman kerja

- b. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- c. Memberi penjelasan pada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dicapai
- d. Menilai prestasi kerja seksi dan sekretariat dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris untuk pembinaan karier
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Melaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan program yang ditetapkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- h. Melakukan usaha dalam rangka menggerakkan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat gotong royong masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempererat rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.
- i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai program yang ditetapkan guna meningkatkan keamanan masyarakat.
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam wilayah kelurahan.



- k. Menggali potensi yang ada dalam wilayah dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- l. Memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang ada dalam wilayah kelurahan.
- m. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan pembinaan kesejahteraan sosial untuk mengetahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan.
- n. Melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan pemerintah dan masyarakat.
- o. Pembuat laporan terhadap atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

## 2. Sekertaris Kelurahan

Sekretariat kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas sekretariat yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Uraian fungsi dari sekretaris kelurahan antara lain:

- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya

- c. Memberi petunjuk kepada bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier.
- f. Melaksanakan dan mengelolah manajemen kesekretariatan kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan administratif kepegawaian, keuangan dan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Memberikan layanan teknis administratif kepada lurah seksi-seksi dan seluruh staf kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Menginventarisasi, mengelolah dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- j. Memberikan saran alternatif kepada lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas. Uraian fungsi seksi pemerintahan antara lain:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan sebagai pedoman kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dicapai
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan karier
- f. Mengumpulkan, mengolah, mengakumulasi data dibidang pemerintahan, ketertiban dan ketentraman
- g. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai data dan informasi yang ada untuk materi pembinaan
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan
- j. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- k. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (Pemilu) untuk kelancaran dan keamanan pemilihan umum.
- l. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Membantu tugas-tugas dibidang pajak bumi dan bangunan (PBB) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- n. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil
- o. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- p. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga
- q. Memberikan saran alternatif kepada lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- r. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup, pelayanan umum, produksi dan distribusi serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Uraian fungsi kelurahan antara lain.

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembangunan sebagai pedoman kerja
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan karier

- f. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pembangunan
- g. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasiaan, pengusaha ekonomie lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- h. Melakukan pelayanan masyarkat dibidang pembangunan
- i. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam miningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan
- j. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan
- k. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan kebersihan lingkungan
- l. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan dikelurahan
- m. Membantu membina dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah pembangunan (MUSBANG) dikelurahan.
- n. Memberikan saran alternatif kepada lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- o. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

#### 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, membantu pembinaan koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial, dan budaya. Bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda,

kewanitaan dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Adapun uraian fungsi dari seksi kesejahteraan rakyat antara lain.

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi kesejahteraan rakyat sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dicapai
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
- e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan karier
- f. Melakukan pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Melakukan pembinaan dalam bidang kesehatan, keagamaan, pendidikan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- i. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan karang taruna
- j. Membantu menyalurkan bantuan pemerintah dan bantuan akibat bencana alam serta bencana lainnya kepada masyarakat
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sedakah serta membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI)
- l. Memberikan saran alternatif kepada lurah untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan. Adapun uraian fungsi dari kelompok jabatan fungsional antara lain.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk walikota
- c. Jumlah jabatan fungsional ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

#### C. Profil Pegawai Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu

Pegawai yang ada dalam lingkungan unit kerja kantor kelurahan Bajimappakasunggu berjumlah 7 orang. Adapun perincian jumlah pegawai yang ada dalam lingkungan unit kerja kantor kelurah bajimappakasunggu sebagai berikut

**Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Dilingkungan Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu Kec. Mamajang**

No	Sub Bagian	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Drs.H. Akbar Yusuf/ Lurah	1 orang
2.	Sapti Arwini, SSTP/ Sekertaris Lurah	1 orang
3.	St. Jumriah, S.Sos/ Kasi pemerintahan	1 orang
4.	Muh. Lutfi, S.Sos/ Kasi Pembangunan	1 orang
5.	Harni Lapandi, SE/ Kasi kesejahtraan	1 orang
6.	Diniarti Puji/ Staf	1 orang
7.	Maudy Saviantri/ PKB	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber : Data kantor kelurahan bajimappakasunggu Tahun 2008*

Sedangkan perincian jumlah pegawai pada kantor kelurahan Bajimappakasunggu menurut golongan dapat perinci sebagai berikut :

**Tabel 4.6. Jumlah Pegawai Dilingkungan Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu Kec. Mamajang Menurut Golongan.**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	III /d	1 orang
2.	III/c	2 orang
3.	III/b	3 orang
4.	Ic	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>

*Sumber : Data Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu Tahun 2008*

Dari perincian pegawai tersebut seluruhnya 7 orang, yang apabila penulis rinci lagi menurut jenis kelamin maka diperoleh bahwa :

- a. Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang.
- b. Pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang

Dari perincian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan di kantor kelurah Bajimapakasunggu kecamatan Mamajang mayoritas pegawai berjenis kelamin perempuan. Dan sebagian lagi berjenis laki-laki perempuan yang mana sebagian besar telah berkeluarga.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan data tentang keadaan kualitas pegawai menurut pendidikan pada kantor kelurahan Bajimappakasunggu kecamatan Mamajang, sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Jumlah Pegawai Dilingkungan Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu Menurut Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S1	5 orang
2.	D4	1 orang
3.	SLTA	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>

*Sumber : : Data Kantor Kelurahan Bajimappakasunggu 2008*

## **BAB V**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan kebijakan BLT di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar.**

Menurut kepala Kelurahan Bajimappakasunggu, Drs.H.Akbar Yusuf dalam rangka menanggulangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dirasakan memberatkan masyarakat miskin maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang diberikan setiap bulan kepada 262 kepala keluarga sangat miskin di kelurahan Bajimappakasunggu sesuai dengan hasil verifikasi data oleh Badan Pusat Statistik.

##### **1. Landasan Kebijakan Pelaksanaan BLT**

Penetapan kebijakan pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) Didasari atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahan bakar minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Kenaikan harga bahan bakar tersebut akan berpengaruh langsung dalam pemenuhan kebutuhan kesinambungan kehidupan dalam setiap rumah tangga dalam masyarakat, utamanya rumah tangga miskin dan sangat miskin.
- Selain minyak tanah, kebutuhan masyarakat yang juga sama pentingnya adalah transportasi yang sangat erat kaitannya dengan bahan bakar minyak (premium, pertamax, solar, dll), baik masyarakat yang memiliki kendaraan

pribadi maupun pengguna kendaraan umum. Kenaikan harga bahan bakar minyak akan menimbulkan kenaikan biaya transportasi.

- Bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan merupakan salah satu jenis bantuan yang bertujuan untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin untuk kebutuhan pembelian bahan bakar dan sifatnya emergency (mendesak).
- Pemberian bantuan berupa minyak goreng dan gula pasir merupakan bantuan tambahan yang juga mendesak karena hampir semua jenis bahan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga.
- Bantuan langsung tunai (BLT) bukan merupakan satu-satunya jenis bantuan yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian rumah tangga miskin dan masyarakat Indonesia secara umum. Bantuan ini merupakan bantuan “antara” yang bertujuan untuk menjadi pertolongan pertama bagi kondisi perekonomian rumah tangga miskin yang terpuruk akibat kenaikan harga-harga di hampir semua jenis kebutuhan hidup.

Untuk menyelamatkan kondisi masyarakat miskin yang terancam gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, pemerintah memberikan Bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000,-/bulan (Seratus Ribu Rupiah per bulan) bertujuan untuk menambahkan sejumlah biaya yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak.

Kebijakan ini tertuang dalam INPRES No3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk RTS. Tugas Kementerian /Lembaga dalam pelaksanaan BLT berisikan :

1. Presiden menugaskan Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian langsung tunai kepada rumah tangga sasaran, dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Presiden menginstruksikan kepada Menko Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait para gubernur, dan kepala BPS.
3. Presiden menginstruksikan kepada Menko Kesra, segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dan penanganan pengaduan.
4. Presiden menginstruksikan kepada Menkeu segera menyediakan pendanaan segera setelah menerima usulan dari Mensos, serta menyusun dan mengendalikan anggaran untuk pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk melakukan koordinasi pelaksanaan dalam

penyusunan rencana pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, menyusun organisasi pelaksanaan program pemberian langsung BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, serta melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

6. Presiden menginstruksikan kepada Mensos untuk menjadi kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan pemberian BLT kepada RTS, mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada menkeu sesuai data rumah tangga untuk program pemberian BLT kepada RTS yang disediakan oleh BPS, serta diinstruksikan kepada Mensos untuk segera menyalurkan BLT kepada RTS sesuai program yang telah disusun oleh Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung segera melakukan penegakakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
8. Presiden menginstruksikan Panglima TNI segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan dalam pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Kepada Kapolri diinstruksikan segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam

menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM

9. Presiden menginstruksikan BPS untuk melakukan kegiatan penyediaan data RTS untuk program pemberian BLT kepada RTS bersama pemerintah kabupaten/kota. Kepada BPKP diinstruksikan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
10. Presiden menginstruksikan para Gubernur, beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing. Kepada para bupati, walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan BLT di Kelurahan Baji Mappakasunggu**

Pak Akbar Yusuf, Kepala Kelurahan Baji Mappakasunggu menjelaskan, pada dasarnya pihak kelurahan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah pemerintahannya, hal ini sesuai dengan instruksi walikota makassar yang merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden no.3 tahun 2008.

Selanjutnya Lurah Bajimappakasunggu menjelaskan bahwa di kelurahannya telah menerima data mengenai Rumah Tangga Miskin (RTS) dari Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2009:

*"...data tentang RTS sebagai calon penerima BLT sudah kami dapatkan dari BPS untuk selanjutnya diserahkan kepada PCL yang kami percayakan untuk turun langsung ke lapangan melakukan klarifikasi data dari BPS..."*

Data ini kemudian menjadi acuan bagi Petugas Pencatat Lapangan yang ditunjuk oleh kelurahan untuk melakukan pendataan kembali dengan menggunakan kuisioner yang telah disediakan oleh BPS sebagai standar kelayakan terhadap Rumah Tangga Sasaran yang memenuhi kriteria. PCL ini sebelumnya telah mengikuti pelatihan pendataan sosial ekonomi penduduk dan program perlindungan sosial selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh BPS. Tentunya ini diperuntukkan agar dalam pencatatan tidak terjadi kekeliruan.

Petugas pencatat lapangan kelurahan Bajimappakasunggu, Nurhaeni (42 tahun) menjelaskan bahwa dia bertugas melakukan pendataan kembali terhadap RTS yang telah ditentukan oleh BPS dengan melakukan wawancara langsung di Rumah calon penerima BLT .

*"...saya ditunjuk sebagai Pencatat Lapangan oleh pak lurah mungkin karena saya sudah beberapa kali menangani pendataan dikelurahan ini, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan... Mengenai pendataan BLT, datanya sudah ada memangmi dari kelurahan, kelurahan dapat data dari BPS. Sebelum mendata, PCL harus training dulu selama 3 bulan, baru langsung diturunkan ke masyarakat yang menerima BLT yang biasa kita sebut RTS..." (Wawancara: 14 Januari 2009)*

Hasil pendataan tersebut tidak lain adalah isian kuisioner terhadap RTS yang memenuhi kriteria, adapun RTS yang tidak memenuhi syarat akan tetap di data demikian juga bagi RTS yang namanya tidak tercantum dalam data awal

yang diberikan oleh pihak BPS tetapi pada kenyataannya RTS tersebut layak untuk menerima BLT, maka PCL akan mendatanya untuk kemudian direkomendasikan dalam daftar RTS yang layak dan berhak menerima BLT. Lain halnya dengan RTS yang sudah pindah atau meninggal maka PCL diberikan wewenang untuk mencoret nama penerima RTS tersebut dari daftar penerima BLT.

Setelah melakukan pendataan dalam kurun waktu 1 bulan, data-data tersebut dalam hal ini hasil kuisioner isian akan diserahkan kepada pihak BPS melalui kelurahan setempat, selanjutnya data ini kemudian di analisis oleh BPS dengan melihat RTS yang mana saja yang pantas mendapatkan BLT. Pemerintah memberikan kebijaksanaan yaitu cukup dengan memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang sudah di tentukan, maka RTS sudah layak untuk menerima dana BLT.

Untuk menentukan RTS yang berhak mendapatkan kupon BLT, BPS melakukan 2 kali verifikasi, yakni verifikasi data untuk menentukan daftar RTS yang sesuai kriteria, dan verifikasi lapangan untuk mencocokkan data yang dilaporkan PCL dan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi inilah yang akan dikirim ke departemen sosial RI sebagai departemen yang bertanggung jawab terhadap anggaran dana BLT yang kemudian akan diserahkan kepada Kantor Pos Pusat untuk bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk mengeluarkan dana BLT serta menyerahkan kupon penerima BLT ke pemerintah setempat untuk didistribusikan kepada yang berhak

Kepala Kelurahan Mappakasunggu mengatakan BPS menyerahkan daftar penerima BLT dan kupon bukti pencairan dana BLT kepada kelurahan untuk dibagikan kepada yang berhak.

Daeng Kuasa (salah seorang penerima BLT dari RW 2 RT 2 mengatakan,

*" ...anjo kartua ritarima ri kelurahanga lalui RT/RW, punna nia'mi kartua,ri passambeangmi doe ri kantor poska..."*

Artinya: Kartu (Kupon BLT) tersebut diterima dikelurahan, kalau kartunya sudah ada, sudah bisa ditukar dengan uang di kantor pos..."  
(Wawancara:15 Januari 2009)

Kupon pencairan dana BLT diperoleh dari pihak kelurahan melalui RT/RW, selanjutnya pencairan dilakukan di kantor pos terdekat dengan membawa serta kupon. Pencairan dana BLT pertamakali dilaksanakan pada bulan Agustus khusus untuk anggaran tahun 2008, kupon inilah yang terus digunakan untuk pengambilan dana BLT selanjutnya yaitu pada bulan Desember 2008.

Arfah (46 tahun), penerima BLT dari RW 3 mengatakan,selama tahun 2008 ini mereka telah menerima BLT sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak Rp. 300.000 rupiah untuk penerimaan selama 3 bulan dan yang kedua sebanyak Rp. 400.000 rupiah untuk penerimaan selama 4 bulan. Sesuai dengan kutipan wawancara peneliti pada tanggal 16 Januari 2008 di kediamannya, mengatakan :

*" Alhamdulillah kami sudah dapa' itu BLT, dek... dua kalima terima saya, yang pertamana itu tiga ratus baru keduana ampa' ratus miseng lagi. Tapi bulang ini belumpa terima lagi...kita disini bersabarmami tunggu kapan lagi pemerintah perhatikan lagi orang misking kaya kita ini, dek..."*

"Artinya: segala puji bagi Allah, kami sudah menerima BLT, dik... saya sudah dua kali menerimanya, yang pertama sebanyak tiga ratus ribu dan yang kedua tiga empat ribu. Tapi bulan ini saya belum pernah lagi menerima...kami disini hanya bersabar menunggu kapan lagi pemerintah memperhatikan orang miskin kaya kami ini, dik..."

Pelaksanaan Program BLT dikelurahan Bajimappakasunggu telah berjalan sesuai prosedurnya, dan tidak terdapat kekeliruan yang dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat penerima BLT. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah di kelurahan Bajimappakasunggu beserta instansi yang terlibat dalam program BLT ini telah menunjukkan kerjasama yang terorganisir dengan baik.

#### **B. Dampak Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Mengimbangi Pengeluaran Masyarakat Dikelurahan Bajimappakasunggu**

Masyarakat miskin (rumah tangga) adalah kelompok yang paling merasakan beban berat akibat kenaikan bahan bakar minyak. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat. Kerentanan terhadap gejolak ekonomi dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan semakin berlarut-larut dengan adanya kenaikan harga BBM. Ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :

- Masyarakat kurang disiapkan sejak awal untuk menggunakan energi secara hemat dan tidak diarahkan untuk menggunakan sumber energi alternatif.
- Subsidi terhadap bahan bakar minyak yang disediakan oleh Pemerintah selama ini cenderung menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan

dan tidak menyadari bahwa pengurangan atau penghentian subsidi tersebut akan menyebabkan peningkatan harga yang sangat signifikan.

- Kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian yang selalu berpihak pada kelompok pemilik modal dan lemahnya kinerja jajaran birokrasi dalam mengawasi kompetisi dunia usaha sehingga seringkali kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok di pasar dalam negeri meningkat secara signifikan dan tidak seimbang terhadap kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi. Hal ini menyebabkan (life cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin tinggi.
- Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin juga terbukti dari minimnya alokasi anggaran untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat/kesejahteraan sosial.
- Sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat terbatas dan tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (misalnya sarana transportasi umum).
- Terbatasnya pelayanan-pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan dll) yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan sosial dasar ini bahkan cenderung diserahkan kepada pihak swasta sehingga biayanya relatif mahal dan seringkali menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di antara pelaku bisnis.

Semua ini memberi dampak himpitan ekonomi terhadap masyarakat miskin, kebijakan pemerintah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai

adalah angin segar bagi mereka untuk sedikit melepaskan lilitan hutang dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok.

### **Pendapatan penerima BLT**

Berdasarkan ketetapan dari pemerintah, rumah tangga yang berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga yang tergolong sangat miskin, atau mereka yang terancam kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat melonjaknya harga di pasar menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Keterangan yang diperoleh dari kelurahan, diketahui sebagian besar penerima BLT di Kelurahan Mappasunggu adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau buruh harian lepas, tukang becak, pemulung dan pedagang jajanan kecil yang tentu saja tidak memiliki penghasilan tetap

Hal tersebut dibenarkan Daeng Kanang (55 tahun) seorang janda yang pekerjaannya menjajakan peyek, makanan kecil yang terbuat dari kacang berbalut terigu tidak bisa memberikan penghasilan tetap, jika sedang beruntung ia bisa mendapatkan keuntungan Rp.5.000 hingga Rp. 10.000 dalam sehari. Jika sedang apes keuntungannya bisa hanya Rp. 3000.

Sementara harga kebutuhan pokok jelas melonjak setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, dengan sendirinya modal pembuatan peyek semakin mahal, karena harga terigu, kacang tanah, dan minyak goreng yang menjadi bahan baku pembuatan peyek rata mengalami kenaikan sebesar Rp. 500. sementara harga jual peyek tetap Rp. 1000.

Senada dengan itu Pemy (41 tahun), yang ditemui rumahnya yang berukuran 4x6 meter, juga mengeluhkan kenaikan harga BBM. Ia mengatakan pendapatannya sebagai tukang batu dengan gaji harian tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sementara kenaikan harga BBM jelas membuat semua harga ikut naik.

Sampai saat ini gajinya sebagai buruh bangunan masih sebesar Rp. 24,000. Akibatnya ia mengalami kesulitan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diperparah dengan status pekerjaannya sebagai buruh harian lepas, dimana pekerjaan tidak selalu datang, adakalanya dia harus nganggur di rumah jika tidak ada panggilan kerja dari mandor proyek.

Keterangan dari Daeng Kanang dan Pemy kiranya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penghasilan rumah tangga penerima bantuan langsung tunai di kelurahan mappakasunggu, bahwa mereka yang menerima BLT adalah keluarga yang berpenghasilan pas-pasan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

### **Kebutuhan Penerima BLT**

Kenaikan harga bahan bakar minyak, transportasi dan barang-barang kebutuhan pokok dirasakan dampaknya oleh semua lapisan masyarakat, tetapi tentunya yang paling berat merasakannya adalah kelompok masyarakat ekonomi lemah, termasuk kelompok rumah tangga miskin yang bermukim di kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan yang tidak diantisipasi dengan upaya peningkatan kemampuan daya beli telah menyebabkan masyarakat miskin

terancam keberlangsungan hidupnya. Tekanan berat yang paling dirasakan oleh masyarakat miskin di keulrahan mamajang utamanya adalah pada tingginya harga bahan bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari, biaya transportasi (ke sekolah, ke tempat kerja) dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang semakin mahal.

Pemerintah memperhitungkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menyebabkan banyak kebutuhan pokok masyarakat menjadi tidak terpenuhi, tertunda dan bahkan berdampak secara akumulasi terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Sesuai paparan salah seorang penerima BLT yang ditemui dikediamannya pada tanggal 20 Januari 2009, Pemy (41 tahun) mengeluhkan:

*"...tanggungan saya itu ada lima orang, gaji cuma 24.000 satu hari tapi diambil perminggu, manami lagi tempat kerjaku jauh, ta'dua kali orang naik pete-pete pulang pergi jadi 12000...boleh dibilang setiap hari saya Cuma bisa pake uang sebesar 10.000 untuk kasih makang keluarga...kalo lebih dari itu berutangma...manami lagi kalo moki bayar kontrakanga untung kalo adaji panggilki kerja kalo tidak ada tongmi...ais menahan laparki lagi, betul-betul susah memang dek kalo tidak ada pemerintah yang bantu kita..."*

Artinya: "tanggungan saya berjumlah lima orang. Gaji Cuma 24.000 rupiah setiap hari tapi diterimanya perminggu, mana lagi tempat kerja saya yang jauh, hingga dua kali harus naik angkot...biaya untuk pulang pergi 12000, dapat dikatakan saya hanya boleh menggunakan uang sebesar 10.000 rupiah untuk memberi makan keluarga...jika lebih dari itu berarti saya harus berutang... mana lagi untuk membayar kontrakan rumah syukur-syukur kalo ada yang memanggil saya untuk bekerja, jika tdk ada lagi...aiss kami terpaksa menahan lapar, sungguh memang sangat susah jika tidak ada bantuan dari pemerintah."

Kenaikan harga BBM membuat penghasilan Pemy (41 tahun) sebagai tukang batu tidak lagi mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, selain melonjaknya harga kebutuhan untuk konsumsi keluarga, biaya transportasi ke tempat kerja menjadi pos pengeluaran terbesar. Setiap hari Femy

harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp. 12.000 untuk sampai ke tempat kerjanya, sementara untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya yang terdiri dari seorang isteri, 2 orang anak serta sepasang mertua yang juga menjadi tanggungannya menghabiskan biaya sedikitnya Rp. 20.000 perhari. Pekerjaannya sebagai buruh bangunan hanya berpenghasilan Rp. 24.000 sehari jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sama halnya dengan Bahri (35 tahun) yang bekerja sebagai *Payyabo' alias Paboya* yang dalam bahasa indonesianya kita sebut sebagai pemulung, untuk sampai di tempatnya biasa memulung, di sekolah dan perkantoran yang terletak di bilangan cendrawasih, bisa ditempuh dengan jalan kaki, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Pengeluaran rutin keluarganya adalah untuk keperluan makan, dan bahan bakar untuk memasak serta membayar sewa kontrak rumah.

Dengan demikian kebutuhan warga miskin sebenarnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari, biaya transportasi (ke sekolah, ke tempat kerja) dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang semakin mahal, sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

#### **Mengimbangi pengeluaran masyarakat miskin.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi 'bencana ekonomi' dalam negeri. Kenaikan harga BBM telah menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan daya beli. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Oleh karena BLT dipandang merupakan bantuan tanggap darurat di bidang ekonomi dan sosial, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi dan sosial

masyarakat pada saat kondisi perekonomian negara sedang mengalami perubahan atau pembenahan.

Dengan adanya BLT pemerintah berharap sekurang-kurangnya untuk satu tahun ke depan masyarakat miskin masih akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jika ditilik dari tujuan dan peruntukannya maka dana BLT yang dibagikan pada warga Kelurahan Mappakasunggu, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena hampir seluruhnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga.

Kepala Kelurahan Mappasunggu mengatakan, BLT memang disiapkan untuk menolong rumah tangga miskin yang terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Hal tersebut senada dengan keterangan Aziz (38 tahun) salah seorang penerima BLT. Ia mengatakan uang dari Bantuan Langsung Tunai yang diterima Rp.300.000 per tiga bulan, dipergunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya, sisanya di pakai beli beras miskin dari kelurahan, karena jika beli dari tempat lain uangnya tidak akan cukup. Uang sebesar 300.000 tersebut mampu mengimbangi kebutuhan keluarganya selama satu bulan.

Menurut Bahri (35 tahun) kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya hidup semakin mahal membuat masyarakat kecil seperti dirinya, sangat bergantung program subsidi langsung dari pemerintah. Sebab penghasilannya sebagai pemulung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, Bantuan langsung Tunai dan Beras Miskin adalah harapan yang sangat berarti

masyarakat pada saat kondisi perekonomian negara sedang mengalami perubahan atau pembenahan.

Dengan adanya BLT pemerintah berharap sekurang-kurangnya untuk satu tahun ke depan masyarakat miskin masih akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Jika ditilik dari tujuan dan peruntukannya maka dana BLT yang dibagikan pada warga Kelurahan Mappakasunggu, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena hampir seluruhnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga.

Kepala Kelurahan Mappasungu mengatakan, BLT memang disiapkan untuk menolong rumah tangga miskin yang terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Hal tersebut senada dengan keterangan Aziz (38 tahun) salah seorang penerima BLT. Ia mengatakan uang dari Bantuan Langsung Tunai yang diterima Rp.300.000 per tiga bulan, dipergunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya, sisanya di pakai beli beras miskin dari kelurahan, karena jika beli dari tempat lain uangnya tidak akan cukup. Uang sebesar 300.000 tersebut mampu mengimbangi kebutuhan keluarganya selama satu bulan.

Menurut Bahri (35 tahun) kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya hidup semakin mahal membuat masyarakat kecil seperti dirinya, sangat bergantung program subsidi langsung dari pemerintah. Sebab penghasilannya sebagai pemulung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya, Bantuan langsung Tunai dan Beras Miskin adalah harapan yang sangat berarti

bagi dia dan keluarganya, meski dana yang diterima pertiga bulan tersebut hanya bertahan selama 1 bulan pertama, selebihnya mengandalkan utang.

Keterangan dari pak lurah yang dibenarkan oleh Bahri dan Aziz sebagai penerima dan pengguna dana BLT menunjukkan dana BLT sangat berarti untuk menutupi kebutuhan pokok rumah tangga miskin di kelurahan mappakasunggu.

### **C. Dampak Kebijakan BLT terhadap Peningkatan Status Ekonomi Masyarakat Dikelurahan Bajimappakasunggu**

Bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000,-/bulan (Seratus Ribu Rupiah per bulan) bertujuan untuk menambahkan sejumlah biaya yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak. Sebagai contoh : kemampuan ekonomi masyarakat miskin untuk membeli bahan bakar minyak (minyak tanah) adalah sebesar Rp. 2.000,-/liter. Dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan minyak tanah menjadi Rp. 2.500,-/liter menyebabkan masyarakat mengalami defisit atau ketidakmampuan ekonomi sebesar Rp. 500/liter. Oleh karena itu uang tunai dalam BLT Plus tersebut dimaksudkan untuk menutupi atau memberikan dukungan sebesar Rp. 500,-/liter untuk pembelian minyak tanah bagi masyarakat miskin.

Tampaknya apa yang diperhitungkan pemerintah bahwa bantuan langsung tunai akan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi kesulitan ekonomi akibat lonjakan harga pasca kenaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menemukan kenyatannya di lapangan. Hal ini sesuai pernyataan lurah Drs.H. Akbar Yusuf berikut:

*" BLT itu Dikeluarkan untuk memberikan bantuan yang sifatnya emergency terhadap masyarakat miskin...Jadi wajar saja kalau dana yang diterima masyarakat terbilang kecil. Namun pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam sebulan"*

Masyarakat penerima BLT di kelurahan Baji mappakasunggu juga mengakui bahwa dana yang mereka terima dihabiskan untuk keperluan konsumtif karena besarnya dana yang diterima memang hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pokok keluarganya masing-masing dalam kurun waktu maksimal satu bulan, bahkan kebanyakan dari masyarakat mengatakan dana BLT yang mereka terima hanya bisa bertahan dalam kurun waktu kurang dari sebulan.

Salah seorang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Daeng Tonji (58 tahun) mengatakan dana yang diterimanya sebesar Rp.100.000 perbulan sangat berarti dalam membantu keluarganya memenuhi kebutuhan pokok.

Senada dengan Daeng Tonji, ketika Bonto (39 Tahun) ditanyakan tentang penggunaan dana BLT setelah ia menerima, Bonto menjelaskan:

*"Anjo doe BLTka kupabbaliangi juku, golla, gangang na ni pabajarangangi inranga....."*  
Artinya: Uang BLT tersebut saya pakai untuk membeli ikan, sayur, minyak tanah dan untuk membayar utang...."(wawancara: tanggal 21 Januari 2009)

Selanjutnya Bonto mengatakan bahwa uang tersebut hanya bisa bertahan satu minggu, setelah itu Bonto yang hanya bekerja sebagai penjual koran kembali menggantungkan hidupnya pada gajinya yang pas-passan bahkan memaksanya untuk kembali berutang. Berikut hasil paparan Bonto:

*" ...ta siminnguji na labussumi anjo doeka, ka jai duduki kebutuhanga, inrangku jai tongngi, tena na gappa si bulang ripakeangi... punna kammaminjo a'bojamaki seng, biasatong anginrangki seng punna tena tojengmi doe ri ballaka...."*

Artinya: "...Hanya seminggu saja uang tersebut habis, karna kebutuhan yang sangat banyak dan utang yang banyak, tidak cukup sebulan uang tersebut habis digunakan...kalau sudah begitu, kita mencari lagi (bekerja) atau berutang lagi jika sudah tidak ada betul uang di rumah..."(Wawancara: 21 Januari 2009)

Meskipun dana BLT tersebut terbilang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sebulan, tapi yang pasti bantuan langsung tunai membuat Daeng Tonji dan Bonto tidak ragu mengambil pinjaman untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya.

Ini memberikan gambaran bahwa dana BLT hanya mampu menutupi kebutuhan masyarakat dalam waktu yang sangat singkat, setelah dana tersebut habis digunakan, maka masyarakat kembali merasakan kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan karena dana yang minim tersebut tidak digunakan untuk keperluan produksi, misalnya untuk modal dalam membuka usaha kecil guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Berikut alasan yang diberikan para penerima BLT kenapa mereka tidak menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha kecil. Daeng Tonji (58 tahun), mengatakan:

*"..tena na nggappa anjo doeka nipakengang modala, tekammami na la'busu ngaseng nipa'balliang pakkanreang... tena nakulle ndi,punna tallussa'bu nipake modala,,stangnga mateki..."*  
Artinya: "...tidak akan cukup jika uang tersebut dipakai bermodal, bagaimana bisa, sedangkan uang tersebut sudah habis untuk dibelikan makanan...tidak bisa ,dik kalau 300.000 dipakai modal, stengah mati...."(wawancara, tanggal 25 Januari 2009)

Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin penerima BLT. Karena harga kebutuhan pangan yang meningkat,

hingga masyarakat juga lebih pada memenuhi kebutuhan keluarganya daripada harus membuka usaha dengan modal yang sangat kecil. Dari beberapa paparan diatas sudah jelas bahwa program BLT tidak dapat meningkatkan status ekonomi penerimanya, akan tetapi dana BLT mampu mengimbangi kebutuhan pokok masyarakat penerima BLT dikelurahan Bajimappakasunggu.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, mengenai dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap peningkatan status ekonomi masyarakat dan pertimbangan pengeluaran rumah tangga miskin penerima BLT, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Kebijakan BLT di kelurahan Baji Mappakasunggu telah dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus sebesar 300.000 rupiah setiap RTS dan 400.000 rupiah pada bulan September-Desember 2008. Dana ini telah diberikan kepada 262 Rumah Tangga Sasaran sebagai hasil verifikasi data penerima BLT oleh BPS. Sejauh ini pendataan dan penyaluran BLT di kelurahan Baji Mappakasunggu berjalan sesuai aturan. Dana bantuan langsung tunai yang diterima oleh rumah tangga miskin sebesar Rp. 300.000 per-tiga bulan hanya mampu mengimbangi kebutuhan keluarga miskin hanya beberapa minggu hingga satu bulan karna diakibatkan ikutnya naik barang-barang kebutuhan pokok masyarakat
2. Dana bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000 per bulan dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, tidak dipergunakan untuk melakukan usaha yang sifatnya produktif karna jumlah tidak dapat mencukupi untuk modal usaha ( rata-rata uang BLT

dipakai untuk bayar utang, dan membeli kebutuhan rumah tangga )  
Sehingga dapat disimpulkan Bantuan langsung Tunai tidak membawa pengaruh pada peningkatan status ekonomi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran BLT dikelurahan Bajimappakasunggu kecamatan mamajang kota makassar..

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, mengenai dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap perimbangan pengeluaran rumah tangga miskin dan dampaknya terhadap peningkatan status ekonomi masyarakat penerima BLT, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Agar Rumah Tangga Miskin yang menjadi sasaran BLT mampu mengimbangi pengeluaran belanja kebutuhan sehari-hari, maka besaran bantuan yang diterima harus ditambah sesuai dengan kebutuhan Rumah Tangga sasaran, dan dibagi perbulan, sesuai dengan kondisi geografis daerah tertentu.
2. Untuk mendorong peningkatan status ekonomi Rumah Tangga Miskin yang menjadi sasaran BLT, sebaiknya bantuan yang di berikan betul-betul mampu menutupi kebutuhan keluarga, kemudian apabila ingin meningkatkan status ekonomie masyarakat sebaiknya dana yang diberikan lebih tinggi sesuai dengan usaha yang mereka buat, setelah itu pemerintah sebagai pemberi modal memonitoring masyarakat agar modal usaha tersebut tidak disalah gunakan sesuai oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- BothosBasir, Drs. 1990 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William N., 1998, *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi II, Cetakan I, UGM Press, Yogyakarta.
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Islamy.M. Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- , 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mustopadidjaja, A.R, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta
- Nirma, Umar. 1999, *Perilaku Organisasi*. Citra Media. Malang
- Nayer, Robert R., dan E. Greenwood, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta
- Ndraha, Talizuduhu, 2003. *Budaya organisasi*. Reneka cipta. Jakarta
- Nugroho D.Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Quinn Panton, Mihhael/ Hill Werely, 1978, *Utilization Fokusd Evolution sube Publication*. London
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Thoha, miftah. 2003 *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja grafindo Persada. Jakarta,
- Hasibuan, Melayu S.P. 2003, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 1989 *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algasindo. Bandung

LAN RI. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Gunung Agung Jakarta.1997  
Vendenbergh Jacob.1978 *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia.  
Jakarta.

#### **Dokumen-Dokumen**

- Keputusan dalam UU APBN-P, Pasal 14 ayat (2):
- INPRES No3/2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk RTS.
- Petunjuk Teknis Penyaluran BLT 2008 dalam kompensasi pengurangan subsidi BBM
- Pedoman Program Perlindungan Sosial 2008 (Pedoman Pencacah), Badan Pusat Statistik Jakarta Indonesia.

#### **Sumber-Sumber Lain: Internet**

[www.clgi.or.id.pdf](http://www.clgi.or.id.pdf), diakses 11 januari 2009. *Evaluasi Kebijakan Perda Partisipatif*. [http://pristiadiutomo.blog.plasa.com/2009/03/19/penelitian-kualitatif/March 6, 2009](http://pristiadiutomo.blog.plasa.com/2009/03/19/penelitian-kualitatif/March%206,%202009) |

## **Lampiran 1. Identitas Informan dan Responden**

### **A. Informan:**

1. Kepala Kelurahan Baji Mappakasunggu:
  - Nama : Drs. H. Akbar Yusuf
  - Jenis Kelamin : laki-Laki
  - Umur : 45 tahun
  - Alamat : Jalan Deng Ngadde raya
2. Petugas Pencatat Lapangan program BLT 2008 di Kelurahan Bajimappakasunggu
  - Nama : Nurhaeni
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Umur : 41 tahun
  - Pekerjaan : PCL Bajimappakasunggu
  - Alamat : Baji Ati. No.34

### **B. Responden**

Masyarakat penerima BLT di kelurahan Bajimappakasunggu

#### 1) Deng Kuasa

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Janda
- Umur : 60 Tahun
- Pekerjaan : Tukang Urut Orang Hamil
- Alamat : Baji Areng No.10. RW II RT 01

#### 2) Arfah

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Umur : 43 Tahun
- Pekerjaan : Buruh harian Tukang Batu
- Alamat : Baji Ati 1 Lorong II No.12 B.

#### 3) Pemi

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Status : Kawin
- Umur : 41 tahun
- Pekerjaan : Tukang Batu
- Alamat : Cenrawasi/271/6

4) Aziz

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Umur : 38
- Pekerjaan : Buruh Pelabuhan/ Angkat
- Alamat : Baji Ateka Ujung RW 03/RT 04/ No

5) Daeng Kanang

- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Janda
- Umur : 55 tahun
- Pekerjaan : Penjual Peyek
- Alamat : Jln Cendrawasih Ir.7 No.16, RW 03/RT 03

6) Bahri

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Umur : 35 tahun
- Pekerjaan : *Payyabo'* (Pemulung)
- Alamat : Jl. Baji Ateka Ujung

7) Daeng Tonji

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Umur : 58 Tahun
- Pekerjaan : Tukang Batu
- Alamat : Cendrawasi Lr.163 No.27

8) Bonto:

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Status : Kawin
- Umur : 39 Tahun
- Pekerjaan : Penjual Koran
- Alamat : Jl. Baji Ateka Ujung RW 03/RT 04

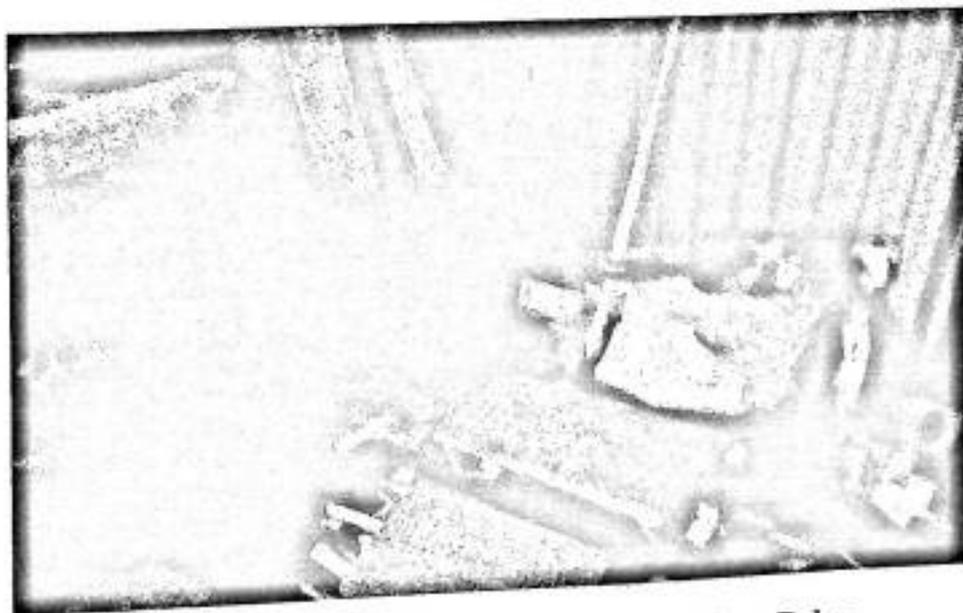


# Struktur Organisasi Kelurahan Bajimappakasunggu





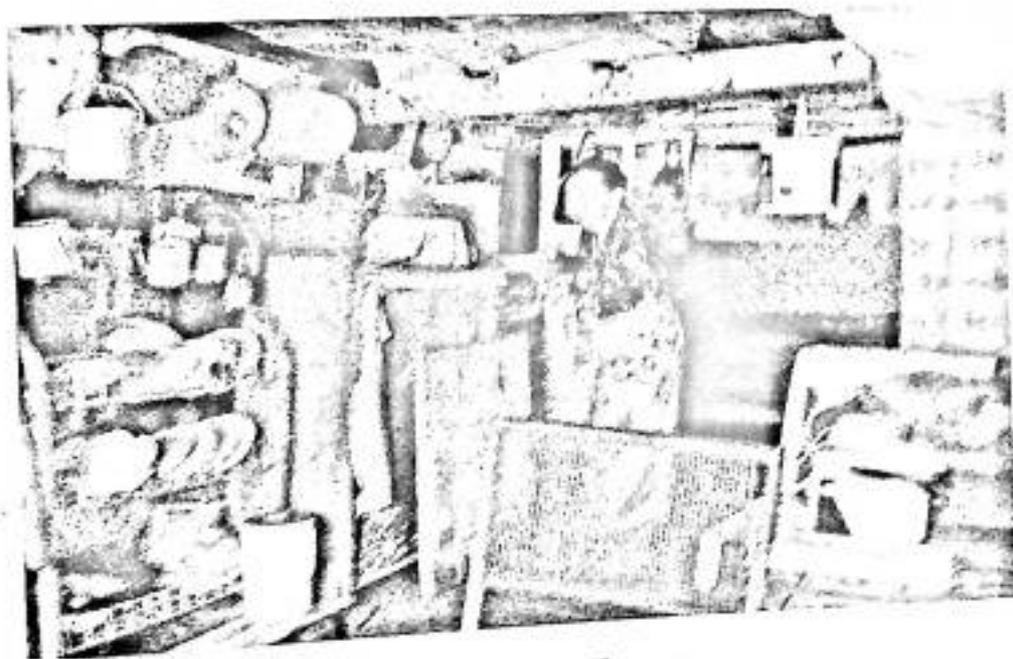
Wawancara dengan Arfah (16/01/2009)



Tempat masak Istri Arfah, menggunakan Kayu Bakar



Daeng Kanang dengan kartu BLT nya



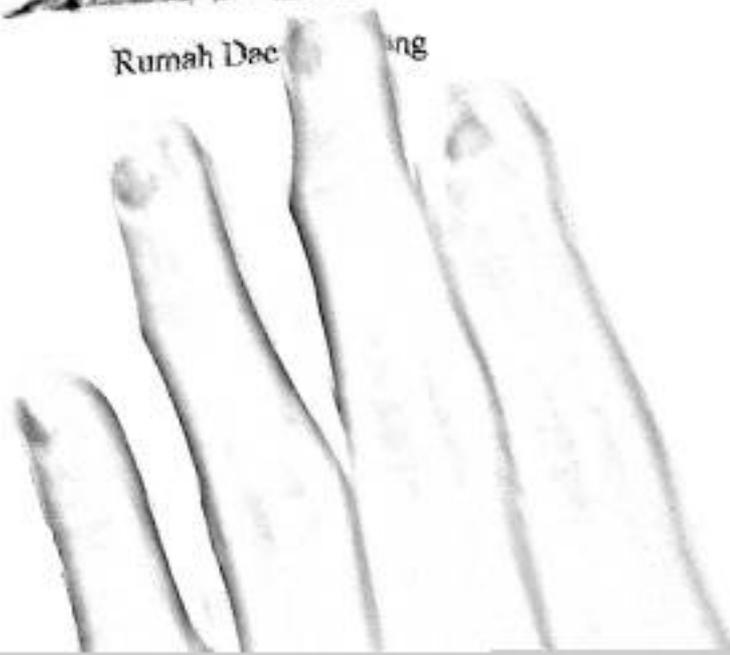
Rumah Daeng Kanang



Daeng Kanang dengan kartu BLT nya

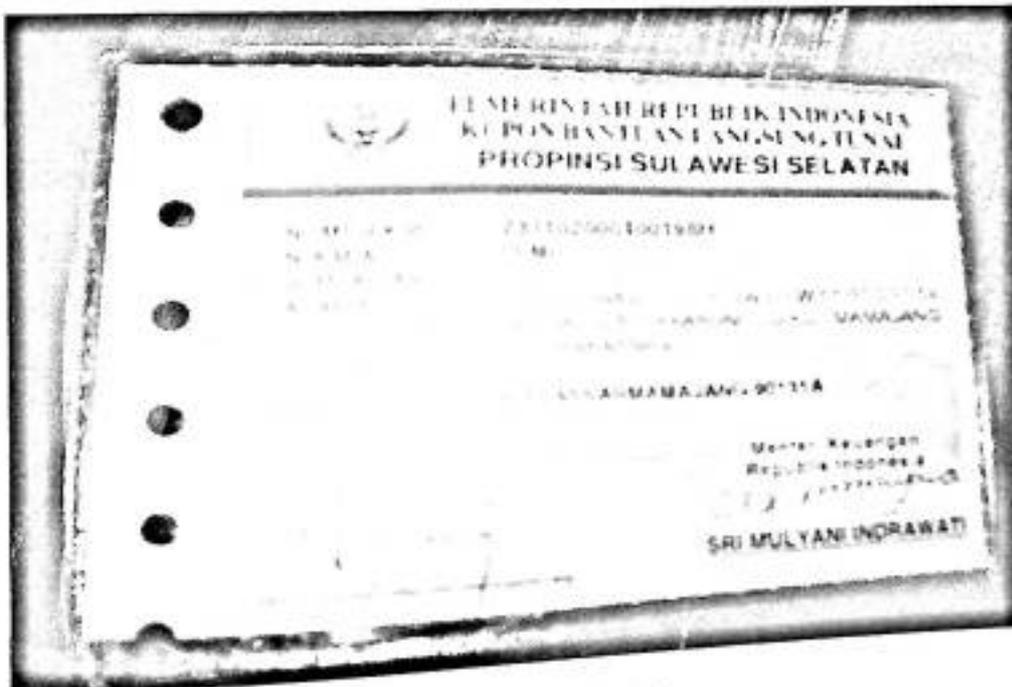


Rumah Daeng Kanang





Wawancara di rumah Pemi (20/01/09)



Kartu BLT milik Pemi

# 4 Kriteria Rumah Tangga Miskin



**1** Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang

**8** Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu



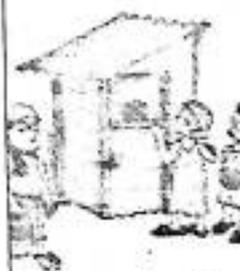
**2** Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murah

**9** Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun



**3** Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester

**10** Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari



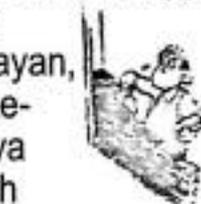
**4** Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain

**11** Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/ poliklinik



**5** Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

**12** Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600 ribu per bulan



**6** Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, dan air hujan

**13** Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD



**7** Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah

**14** Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500 ribu seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.



- Ketentuan :**
- Rumah tangga yang tidak dapat memenuhi 9 dari 14 kriteria dianggap Tidak layak untuk mendapatkan bantuan rumah tangga miskin
  - PNS, TNI, Polri / Pensiunan, Pengungsi yang diurus Pemerintah,
  - Memiliki Sepeda motor / Perahu motor